

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PROGRAM KELUARGA  
BERENCANA DI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG**

Dody Firgiawan<sup>1</sup>

Dadan Kurnia<sup>2</sup>

Atik Rochaeni<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*  
dodyfirgiawan55@gmail.com

**Abstrak**

Penduduk atau warga negara merupakan suatu aset negara yang sangat penting bagi seluruh kebijakan pemerintah dan program pembangunan nasional. Setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memajukan negara dan bangsa tidak lepas untuk membangun kesejahteraan penduduknya. Permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara.

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung” diangkat karena implementasi kebijakan berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga melalui program keluarga berencana dianggap masih terindikasi belum terlaksana secara maksimal, khususnya di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (1980) dengan indikator yang meliputi Kekuasaan (*power*) dan *strategi actor* yang terlibat (*interest strategi of actors involved*); Karakteristik lembaga dan peguasa (*institution and regime characteristics*); dan Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

informan utama ialah Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Kepala UPTD Pengendalian Program KKBPK; Kepala UPT Keluarga Berencana Kecamatan Cangkuang, dan Masyarakat peserta program Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam tuntutan untuk mengerjakan tugasnya dilakukan dengan kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan BKBKS setiap bulan selalu melaksanakan rapat bulanan yang terdiri dari aparatur BKBKS serta mengundang UPT PPKB yang ada di setiap Kecamatan dan Kade-kader disetiap wilayah Kecamatan khususnya di wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung; serta pengawasan yang dilakukan oleh BKBKS tidak terlalu ketat, umumnya mereka melakukan rapat koordinasi setiap satu bulan ataupun satu minggu sekali walaupun masih ditemukan permasalahan dan kendala di lapangan. Karakteristik lembaga dapat dilihat dari kualitas kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan peran Kepala Dinas, dimana pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aparatur yang ada BKBKS sudah cukup baik walaupun masih ditemukannya kinerja aparatur yang tidak sesuai tupoksi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta struktur birokrasi yang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Serta Penyesuaian pekerjaan yang dilakukan Pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang sudah dilakukan pengoperasian membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh para aparaturnya walaupun standar operasi prosedur yang terjadi belum terjadi secara optimal karena belum adanya struktur yang sesuai dengan aturan yang ada; dan dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) di tuntut untuk mengerjakan tugasnya dengan keberhasilan mereka dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Karakteristik lembaga dapat dilihat dari kualitas kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan peran Kepala Dinas. Penyesuaian pekerjaan yang dilakukan Pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang sudah dilakukan pengoperasian membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh para aparaturnya.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Ketahanan Keluarga, Program Keluarga Berencana*

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

### ***Abstract***

*Population or citizens are a very important state asset for all government policies and national development programs. Every effort made by the government in order to advance the country and nation cannot be separated from building the welfare of its population. The problem of population growth in a country is something that must be considered seriously, because if there is a large and uncontrolled growth rate, it will cause various other complex problems that can disrupt the development process of a country.*

*The research in this thesis entitled "Implementation of Regional Regulation Number 12 of 2022 Concerning Family Resilience Development through the Family Planning Program in Cangkuang District, Bandung Regency" was raised because the implementation of policies related to family resilience development through the family planning program is considered to still be indicated as not being implemented optimally, especially in Cangkuang District, Bandung Regency.*

*The theory used in this study is the theory of policy implementation put forward by Grindle (1980) with indicators including Power and the strategy of actors involved (interest strategy of actors involved); Characteristics of institutions and authorities (institution and regime characteristics); and Compliance and responsiveness of implementers (compliance and responsiveness). The research method used is a qualitative approach with data collection methods including interviews, observations, and documentation, with the main informants being the Head of the Family Planning and Family Welfare Division of DP2KBP3A Bandung Regency, Head of the UPTD KKBPK Program Control; Head of the UPT Family Planning of Cangkuang District, and the Community participating in the Family Planning program.*

*Based on the results of this study, it was found that in the demands to carry out its duties, socialization activities are usually carried out by BKBKS every month, always holding monthly meetings consisting of BKBKS apparatus and inviting UPT PPKB in each District and Cadres in each District area, especially in the Bandung Regency District area; and the supervision carried out by BKBKS is not too strict, generally they hold coordination meetings once a month or once a week even though problems and obstacles are still found in the field. The characteristics of the institution can be seen from the quality of the quality of human resources, facilities and infrastructure, bureaucratic structure, and the role of the Head of Service, where employee development in order to improve the quality and quantity of existing BKBKS apparatus is quite good even though there are still apparatus performance that is not in accordance with their*

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

*duties and functions, inadequate facilities and infrastructure, and bureaucratic structures that are not in accordance with existing regulations. And the adjustment of work carried out in building family resilience through the KB program in the Cangkuang District area has been carried out, operations require the abilities of its apparatus, although the standard operating procedures that occur have not occurred optimally because there is no structure in accordance with existing regulations; and demanded to be more capable of providing better quality services, in the sense of being more oriented towards community aspirations, more efficient, effective and responsible.*

*The Family Planning and Family Welfare (BKBKS) apparatus is required to carry out its duties with their success in providing services to the community determined by an assessment of its performance.*

*The characteristics of the institution can be seen from the quality of human resources, facilities and infrastructure, bureaucratic structure, and the role of the Head of the Service. Adjustments to the work carried out in building family resilience through the KB program in the Cangkuang District area have been carried out, operations require the capabilities of its apparatus.*

*Keywords:* Implementation, Family Resilience, Family Planning Program

## PENDAHULUAN

Penduduk atau warga negara merupakan suatu aset negara yang sangat penting bagi seluruh kebijakan pemerintah dan program pembangunan nasional. Setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memajukan negara dan bangsa tidak lepas untuk membangun kesejahteraan penduduknya. Permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara.

Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di propinsi merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam bidang

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran disatu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian dilain pihak. Selain itu, struktur umur penduduk yang kurang seimbang disebabkan oleh karena sebagian besar penduduk berumur muda. Salah satu akibatnya, tingkat beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara kelompok penduduk yang tidak bekerja terhadap kelompok penduduk yang bekerja, relatif tinggi.

Dalam menyikapi tantangan global serta menyangkut mengenai kependudukan di Indonesia tersebut, pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menginisiasi terbentuknya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut UU PKPK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Mengingat bahwa keluarga merupakan pilar utama dalam membangun bangsa karena kualitas hidup keluarga merupakan cerminan dari kualitas hidup bangsa. Semakin baik ketahanan keluarga tersebut, semakin berkualitas pula hidup suatu bangsa. Ketahanan keluarga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga erhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan partisipasi dalam masyarakat yang berintegrasi sosial.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan ketahanan keluarga yang merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi untuk dapat memenuhi keutuhan fisik maupun psikososial keluarga. Sehingga dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Ketahanan keluarga ini yang akan mencegah dan menyembuhkan terjadinya permasalahan sosial dan keluarga pula yang akan menjadi sumber utama dalam pengembangan

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

dan pencapaian tujuan pembangunan. Ketahanan keluarga ini akan memberikan *output* berupa kesejahteraan. Berkaitan dengan hal itu, dirasa perlu bagi masyarakat Indonesia untuk dapat meningkatkan ketahanan keluarganya. maka untuk mewujudkannya dilakukan melalui berbagai program.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisian dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Kebijakan pemerintah berupa program keluarga berencana merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan masyarakat dimulai dari pinggir yaitu desa, dusun, atau setingkat RW. Akan tetapi masyarakat saat ini masih cenderung memiliki stigma atau pendapat yang kurang baik di masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program keluarga berencana. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program keluarga berencana masih

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

belum diterapkan secara baik. Hal tersebut dapat terlihat dari enam desa di Kecamatan Cangkuang yang dua diantaranya masih memiliki kendala dalam mengimplementasikan program keluarga berencana.

Mengacu data BPS Tahun 2022, bahwa Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,67 ha, yang terdiri atas 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah ± 19 jiwa/hektar. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 54,10 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 penduduk tidak produktif. Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3,215,548 jiwa, dengan sex ratio 103,91. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Bandung terdapat 104 penduduk laki-laki.

Meningkatnya jumlah masyarakat menjadikan suatu problematika dan sangat mengganggu dari Pertumbuhan Ekonomi maupun Pembangunan nasional yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam menangani masalah ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan kewenangan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana.

Masalah Keluarga Berencana Kecamatan Cangkuang mengenai program keluarga berencana yang belum berjalan di beberapa desa hal tersebut masih belum teratasi dengan baik. Pada tingkat desa juga terdapat pengurus KB, dengan harapan karena lebih dekat dengan warga

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

masyarakat sehingga masyarakat sadar akan pentingnya KB. Dari Kecamatan Cangkuang ini pada tahun 2020 kini masih belum maksimal dari masyarakat yang menggunakan KB karena mereka masih canggung dan belum mengetahui apa itu KB. Maka di ambil keputusan untuk menciptakan program kerja dan implementasi untuk bertugas lapangan keluarga berencana turun langsung dari lapangan untuk memberikan arahan kepada masyarakat desa.

Peserta program keluarga berencana di Kecamatan Cangkuang, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk masyarakat di Kecamatan Cangkuang adalah 127.78 jiwa. Dari sekian banyak masyarakat di Kecamatan Cangkuang menurut data diatas jumlah masyarakat yang mengikuti program keluarga berencana di Kecamatan Cangkuang 15.431 orang di setiap desanya kini lebih meningkat. Dan sedangkan masyarakat di kecamatan Cangkuang yang tidak mengikuti program keluarga berencana adalah 5.081 orang di setiap desanya.

Masih minimnya kegiatan yang dilakukan dalam melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, ditambah terhambatnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan kurangnya anggaran dan sedang dimasa pandemi Covid-19, sehingga pihak pemerintah mengurangi kegiatan yang bersifat berkerumun, dampaknya masyarakat menjadi tidak faham akan kebijakan program keluarga berencana yang diterapkan didesanya. Selain itu, masih rendahnya peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dalam menjadi peserta program keluarga berencana yang aktif dikarenakan pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana. Mengingat kondisi yang terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat menjadi peserta program keluarga berencana aktif pada pelaksanaan program keluarga berencana di wilayah Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

## PEMBAHASAN

### **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Kekuasaan (*Power*) dan *Strategi Actor* yang Terlibat (*Interest Strategy of Actors Involved*)**

Dalam kekuasaan, proses pengambilan keputusan merupakan upaya manajemen didalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran, karena pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Masa depan organisasi dipertaruhkan apabila pengambilan keputusan mengalami kegagalan, oleh karena itu ketepatan dalam pengambilan keputusan menjadi suatu keharusan, namun demikian untuk mencapai hal tersebut bukanlah hal yang mudah diperlukan kecermatan dan ketepatan dalam merumuskan masalah dalam proses pengambilan keputusan.

Aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) di tuntut untuk mengerjakan tugasnya dengan keberhasilan mereka dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian tidak hanya dilakukan untuk membantu mengawasi sumber daya manusia aparatur penilaian juga untuk mengukur tingkat efisiensi pengguna sumber daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu di perbaiki, penilaian terhadap struktur birokrasi Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang merupakan faktor penting yang meningkatkan kinerja dan kepuasan struktur birokrasi, bagian-bagian yang menunjukkan kaemampuan aparatur yang kurang dapat

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

mengidentifikasi dan diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerja struktur birokrasinya.

Pengambilan keputusan merupakan sebagai suatu proses strategi, maka pengambilan keputusan terdiri atas serangkaian tahapan kegiatan. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam pelayanan publik melalui Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelayanan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan. Pola hubungan pelayanan yang terjadi di dalam lingkungan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelayanan publik melalui pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang.

Penyebaran tanggung jawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan pelayanan publik melalui Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Para pelaksana pelayanan khususnya pelayanan pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif. Penyebaran tanggung jawab tersebut terwujud dalam kinerja pelaksana kebijakan dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Kerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

masing, seperti melalui pusat informasi berkewajiban untuk menambah aplikasi yang sudah ada melalui pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang.

Penyebaran tanggung jawab tersebut telah sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) melalui aparatur pelayanan pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Penyebaran tanggung jawab yang berada pada pelayanan pembayaran bisa dilihat dari tugas masing-masing aparatur mulai dari aparatur yang memasukan data dan mengecek kembali persyaratan-persyaratan masyarakat disaat melakukan pelayanan publik melalui pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan cangkuang.

### **Karakteristik Lembaga dan Pengusa (*Institution and Regime Characteristics*)**

Karakteristik lembaga Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi. Karakteristik tersebut yang membuat Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) lebih membantu pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB. Umumnya perubahan yang terjadi pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada. Karena perkembangan tersebut dapat berubah-rubah sesuai dengan kondisi dan progres kinerja program yang sedang diimplementasikan.

Dinamika yang terjadi seharusnya dapat merubah karakteristik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Perubahan kualitas pun harus merubah Jumlah

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

personil yang dirasakan pada lapangng masih sedikit harus dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup banyak. Kondisi tersebut dihadapi oleh aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang, oleh karena itu kualitas dari pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB ini harus dapat melayani kebutuhan masyarakat yang cukup banyak, dalam hal pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB. Hal ini dapat bermanfaat dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan akurat terhadap masyarakat.

Pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang merupakan perubahan pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB yang ada, seharusnya perubahan atau kualitas tersebut bisa disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada. Jumlah petugas yang ada menyebabkan tersedatnya pada kualitas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang sehingga dalam kualitas tersebut belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ada.

### **Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)**

Kemampuan dan kesedian aparatur dalam menghadapi pekerjaan mengenai Pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang , hal ini berkaitan dengan penyesuaian pekerjaan yang dilakukan Pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang sudah dilakukan pengoprasian membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh para aparaturnya. Faktor sarana juga menentukan kelancaran pengoprasian pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang.

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

Penerapan prosedur operasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam pelayanan publik dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya (standar operating procedures atau SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) di tuntut untuk mengerjakan tugasnya dengan keberhasilan mereka dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh penilaian terhadap kinerjanya. Pengambilan keputusan merupakan sebagai suatu proses strategi, maka pengambilan keputusan terdiri atas serangkaian tahapan kegiatan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang seperti kebutuhan pendukung sarana dan prasarana yang layak, aparatur sering menghadapi situasi banyaknya masyarakat, Permasalahan disaat berhadapan dengan masyarakat yang sering emosional karena pemahaman mereka akan pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB yang masih kurang. Adapun

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) setiap bulan selalu melaksanakan rapat bulanan yang terdiri dari aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) serta mengundang UPT PPKB yang ada di setiap Kecamatan dan Kader-kader disetiap wilayah Kecamatan khususnya di wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut untuk mengevaluasi, memberikan masukan yang kurang pada kegiatan Pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Kabupaten Bandung. Bahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) tidak terlalu ketat, umumnya mereka melakukan rapat koordinasi setiap satu bulan ataupun satu minggu sekali. Lingkungan yang bernuansa kekeluarga dibangun untuk menciptakan suasana yang nyaman diantara aparatur Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS).

- 2) Karakteristik lembaga dapat dilihat dari kualitas kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan peran Kepala Dinas. Struktur birokrasi Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) cenderung yang ada melalui pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang oleh pelayanan publik melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat aparatur melaksanakan perintah dengan baik pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Namun masih ditemukan aparatur bertindak bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan; sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara maksimal; dan struktur birokrasi Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB belum sesuai dengan struktur birokrasinya. Oleh karenanya, pengembangan pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aparatur yang ada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) untuk Penyuluhan Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Konsistensi pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB sudah dapat cukup baik. Sedangkan peran Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) memiliki peran Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS), kepada satuan pengawasan intern, sekretaris, serta mengusulkan dan memimpin berbagai kegiatan.

- 3) Penyesuaian pekerjaan yang dilakukan Pada pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang sudah dilakukan pengoperasian membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh para aparaturnya. Faktor sarana juga menentukan kelancaran pengoprasiyan pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang. Penerapan prosedur operasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang, walaupun dalam pembangunan ketahanan keluarga melalui program KB di wilayah Kecamatan Cangkuang ini mengalami adanya kendala. Pada faktanya standar operasi prosedur yang terjadi belum terjadi secara optimal karena belum adanya struktur yang

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

sesuai dengan aturan yang ada. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Kemudian dalam daya tanggap, faktor komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Komunikasi artinya menyampaikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai jasa atau layanan yang ditawarkan, biaya jasa, *trade off* antara jasa dan biaya, serta proses penanganan masalah potensial yang mungkin timbul seperti terjadinya kesalahpahaman antara aparatur pelayanan dan masyarakat yang menyebabkan kekelituan dalam menyampaikan informasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Akib, Haedar., Tarigan. (2000). Artikulasi Konsep Implementasi kebijakan perspektif model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Universitas Airlangga*
- Anderson, James. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt
- Andini., dkk. (2012). *Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan PUS Tentang Informasi KB*. *Jurnal Universitas Alma Ata Yogyakarta*, VI 11, No (3)
- Arikunto, Suharsimi. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

- Bryant, Coralie., Louise G White. (1987). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Campbell, Donald T. (1950). *The Indirect Assessment of Soscial Attitudes*. Psychological Journal, Vol 47, No (1)
- Cardno, AG., dkk. (2016). *Homozygous Single Base Deletion in TUSC3 Cause Intellectual Disability With Development Delay in Omanii Family*. Journal of A Med Genet
- Dunn, William N. (1993). *Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood
- Gogging, Malcolm L., et al. (1990). *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*. USA: Foresmann and Company
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University
- Harsono, Hanifah. (2002). *Impelemetasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hughes, Owen E. (1994). *Public Management and Administration an Introduction*. London: Martin Press
- Korten, David C. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Koryati, Nyimas Dwi. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia
- Meter, Donal Van., Carl E Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society
- Moleong, J Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustari, N. (2013). *Pemahaman Teoritis, Empiris*. Jakarta: Membumi Publishing

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

- Nawi, Rusdin. (2018). *Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Universitas Satria Makassar
- Notoatmodjo. (2014). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2016). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Putri, Sekar Febiola. (2021). *Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rahmawati, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategis Kabupaten di Kabupaten Bone*. Makassar: Universitas Muhammdiyah Makassar
- Ramadona, Indah Dian. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencapai Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Payakumbuh*. Jurnal IPDN
- Rohman, Arif. (2009). *Memahami Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Safitri, Budi. (2016). *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis*. Yogyakarta: Quantum Sinergis Media
- Santoso. (2017). *Dukungan Keluarga Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Pasien Skizofrenia Di Poli Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wedioningrat Lawang*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Schneider, AL., H Ingram. (2007). *Public Policy and Democratic Citizenship: What Kinds of Citizenship Does Policy Promote?*. *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods Edited by Fischer, F, et all.* New York: CRC Press

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sudiyono. (2007). *Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sukyati, Ira., Lucia Firsty., Eko Saputro. (2021). *Peningkatan Ketahanan Keluarga Dari Aspek Kesehatan, Psikologis, Serta ekonomi Melalui Edukasi Kader di Kelurahan Gedong Jakarta Timur*. Jurnal Akademi Keperawatan Pasar Rebo, Vol 1, No (10)
- Sulistyawati, Ari. (2013). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta: Salemba Suryana. (2009). *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPPI
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Prses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CASP
- Wiriana, Yunus S., Eka Yulyana., Evi Priyanti. (2020). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok Tribina Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang*. Jurnal Moderat Unigal, Vol 6, No (4)
- Witono. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol 4, No (3)

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

- Wulandari, D. H. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pasien Tuberkulosis Paru Tahap Lanjutan Untuk Minum Obat di RS Rumah Sehat Terpadu Tahun 2015*. Jurnal ARSI, Vol 2, No (1)
- Yatim, W. (1986). *Genetika*. Bandung: Penerbit Tarsito
- Yenie, H. (2016). *Hubungan Kepatuhan Akseptor KB Pil dengan Kegagalan Kontrasepsi Pil di Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Keperawatan, Vol 8, No (2)
- Yuhaedi, LT., T Kurniawati. (2013). *Buku Ajar Kependudukan dan Pelayanan KB*. Jakarta: EGC

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

**JURNAL PRINSIP**

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>  
DOI : <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2918>

**VOLUME 1 No.2 2025**

E-ISSN XXXX-XXXX P-ISSN XXX-XXXX

Received : 16 jan 2025

Accepted : 16 jan 2025

Published : 10 feb 2025

---

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Ketahanan  
Keluarga

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata  
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak